

## PENGARUH PERIODE POLITIK, DUKUNGAN POLITIK, PERTUMBUHAN PAD DAN PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH TERHADAP BUDGET FORECAST ERROR

Ikin Solikin<sup>1</sup> Eka Tania Primadika<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia<sup>1,2</sup>

**Abstract.** This study aims to determine the effect of the political period, political support, the growth of regional original opinion, and the growth of regional spending on budget forecasting errors. This study uses data from the Regional Government Financial Reports (LKPD) of the Supreme Audit Agency (BPK) 2010-2015 local government websites and puskapol.ac.id. The selection of samples using purposive sampling with a sample of 50 local governments. Data analysis was using descriptive statistics, classical assumption tests and hypotheses test. The results of research that the growth of political support, local revenue, and regional expenditure growth have a positive effect on budget forecasting errors, while tenure has a negative effect budget forecasting error.

**Keywords.** Budget forecasting errors; Political Support; PAD Growth Regional Expenditure Growth; Term of Office

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh periode politik, dukungan politik, pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja daerah terhadap kesalahan peramalan anggaran. Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2010-2015 website pemerintah daerah dan puskapol.ac.id. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan sampel sebanyak 51 pemerintah daerah, analisis data menggunakan descriptive statistik, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini pertumbuhan dukungan politik, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kesalahan peramalan anggaran sedangkan periode jabatan berpengaruh negatif terhadap kesalahan peramalan anggaran.

**Kata kunci.** Dukungan Politik ;Kesalahan peramalan anggaran; Periode Jabatan; Pertumbuhan PAD; Pertumbuhan Belanja daerah

**Corresponding author.** Email: ikin.solikin@upi.edu<sup>1</sup>, etaniaprimadika@student.upi.edu<sup>2</sup>

**How to cite this article.** Solikin, I. & Primadika, E.T. (2022). Analisis Budget Forecast Errors. *Jurnal Akuntansi Riset dan Keuangan*, 10(2) 281-296.

**History of article.** Received: Juni 2022, Revision: Juli 2022, Published: Agustus 2022

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v10i2.47014

Copyright©2022. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

### PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah dilakukan efektif mulai dari 1 Januari 2001 telah mengubah banyak aspek dalam masyarakat termasuk aspek tentang keuangan daerah yang awalnya menganut sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan,

ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis dalam menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian (Mardiasmo, 2004). Dengan dua langkah tersebut pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan secara penuh pada pemerintah daerah untuk mengatur keuangannya secara mandiri.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang

dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah sebuah proses yang digunakan untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2004). Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran pendapatan belanja daerah merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam masa satu tahun anggaran yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Maka dari itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disusun secara akurat namun masih terjadi kesalahan dalam penganggaran Warner dan Garret (2004) berpendapat kesalahan penyusunan anggaran disebabkan karena tidak mudahnya melakukan penyusunan anggaran yang mengakibatkan keterlambatan penyusunan. Keterlambatan tersebut menandakan ketidakmampuan sebuah daerah untuk meramalkan secara tepat dan cepat tingkat pendapatan dan pengeluaran, sedangkan ketepatan adalah hal yang penting untuk mempengaruhi keuangan daerah.

Sedangkan Menurut Kusnandar dan Siswanto (2012) salah satu yang dapat mempengaruhi proyeksi keuangan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah karena berpengaruh terhadap belanja modal dalam APBD, di samping itu faktor keuangan lain yang berhubungan dengan anggaran dapat berpengaruh pada kemungkinan *budget forecast error*. Tingkat *budget forecast error* atau kesalahan proyeksi anggaran bukan hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan bahwa kesalahan proyeksi anggaran bisa terjadi dari faktor politik (Brogan, 2012). Salah satu faktor politik yang terjadi yaitu pada saat masa pemilu dimana terjadi peningkatan pengeluaran di masa pemilu (Kusuma dan Sutaryo, 2012).

Kepala daerah dapat meningkatkan probabilitas pemilihan kembali dengan menyatakan pengeluaran atau belanja yang lebih tinggi di tahun pemilihan. Hal ini

digunakan untuk menghindari pemotongan pada tahun-tahun pemilihan tersebut agar lebih besar selanjutnya mereka membuat proyeksi yang memungkinkan pemerintah membuat peningkatan dalam pengeluaran (Veiga & Boukari, 2016). dibuktikan dengan menjelang pemilihan kabupaten dan kota mengalami kenaikan anggaran belanja yang cukup signifikan dimana tertinggi berada di Kabupaten Pekalongan sebesar 24% .

Dalam praktek dilapangan penyusunan anggaran dalam APBD masih terdapat banyak kesalahan. Dilansir dari medcom.id Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan menjelaskan penganggaran pendapatan dan belanja di pemerintah daerah banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan, defisit masih mencapai 6% dari pendapatan daerah dan penempatan modal yang belum akuntabel. Selain itu berikut ini kesalahan dalam memproyeksikan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah di pulau Jawa, dikutip dari metro.sindonews.com. Kesalahan proyeksi anggaran juga dapat dilihat dari belanja hibah yang tinggi contohnya pada Kabupaten Serang yang menganggarkan jatah dana aspirasi untuk masing-masing anggota dewan sebanyak Rp. 200 juta per orang dan untuk anggota Rp. 100 juta per orang. Hal ini sangat rawan dilakukan saat menjelang pemilihan kepala daerah dimana anggota legislatif diberikan kucuran dana untuk memperbaiki hubungan antara legislatif dan eksekutif dikutip dari m.jpnn.com. Dikutip dari tribunnews.com dalam anggaran perjalanan dinas Forum Indonesia untuk Transparansi merilis kelebihan pembayaran atau *mark up* sebanyak 114 tiket dan merugikan negara sekitar Rp. 121.143.160 dan terdapat 87 tike fiktif yang mengakibatkan kerugian Rp. 238.965.399 dan penganggaran masih belum menggunakan *real cost* yang diatur pada tahun 2013. Selain itu dikutip dari jowonews.com perencanaan APBD Kendal pada tahun 2015 perlu dipertanyakan pasalnya hingga tahun

2015 ini, sisa lebih penggunaan anggaran diperkirakan mencapai Rp. 200 milyar. Adapun yang dikutip dari lintas-jateng.com pada tahun menjelang pilkada Kabupaten Pekalongan menerima dana bansos sekitar Rp. 45 juta dan total sekitar Rp. 7,9 miliar.

Oleh karena itu proses penyusunan anggaran melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana SKPD memungkinkan untuk melakukan penggelembungan (*mark up*) untuk target belanja atau pengecilan (*mark down*) untuk target pendapatan dalam usulan anggaran yang disampaikan ke tim APBD. Akibat dari penggelembungan anggaran adalah terjadinya sisa anggaran, baik ketika output kegiatan maupun yang belum tercapai. Ketika output anggaran dapat dicapai maka sisa anggaran disebut sebagai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga bersifat bebas untuk digunakan bagi kegiatan tahun anggaran berikutnya akibatnya ketidakakuratan dalam proyeksi penganggaran atau *budget forecast errors* yang terjadi akibat kesenjangan anggaran dan realisasi.

Penelitian mengenai *budget forecast errors* telah dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto pada tahun (2015) dengan mengambil tahun pilkada pada tahun 2010. Penelitian Kusnandar dan Siswanto (2015) menggunakan variabel kontrol yaitu tipe pemerintahan dan kompleksitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan Maesa (2017) tidak menggunakan rasio atau laju pertumbuhan sebagai pengukuran variabel independen dan hanya mencakup sepuluh Sumatera. Dalam penelitian ini tidak digunakan variabel kontrol karena pada penelitian sebelumnya tidak berpengaruh. Selain itu dalam penelitian ini mencakup sepuluh Jawa karena fenomena yang disebutkan di atas dan maraknya terjadi kesalahan penganggaran disengaja maupun hanya kesalahan dalam pencatatan.

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah kontrak antara

manajemen (agen) dengan pemilik (principal). Mereka menggambarkan teori agensi sebagai hubungan keagenan antara rakyat dengan pemerintah daerah, hubungan yang memiliki kontrak yang ditetapkan oleh rakyat sebagai principal dan pemerintah sebagai agen untuk menyediakan jasa (Tiara dan Susanto, 2013). Menurut Halim dan Abdullah (2006) terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak dalam hubungan keagenan yaitu pemberi kewenangan atau kekuasaan dan penerima kewenangan.

Pada kenyataannya wewenang yang diberikan *principal* kepada agen sering mendatangkan permasalahan karena ketidaksesuaian tujuan agen dengan *principal*. Dengan kewenangan yang dimiliki, agen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengesampingkan hak dan kepentingan dari *principal*. Ini terjadi karena perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya sehingga menimbulkan adanya *asymmetric* informasi. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sedangkan bagi *principal* akan sulit mengontrol informasi karena sedikit informasi yang ada (Jensen dan Meckling, 1976).

Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja akan menimbulkan permasalahan antara agen (kepala daerah) dan *principal* (rakyat yang diwakili dewan legislatif) akan menimbulkan kesenjangan informasi antara keduanya. Adanya asimetris informasi menimbulkan permasalahan kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan pengawasan serta kontrol terhadap tindakan-tindakan agen (Arifah, 2012). Kekurangan informasi inilah yang dapat dimanfaatkan secara tidak langsung oleh agen untuk kepentingan sendiri maupun kelompoknya (Hartanto dan Prubohudono, 2013). Pemerintah sebagai *prinsipal* mempertanggungjawabkan pengelolaan

sumber daya dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diakses oleh rakyat sebagai agen, sehingga rakyat dapat berperan serta memantau kinerja pemerintah daerah (Maesa, 2017:3).

Adanya *discretionary power* akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak keagenan seperti terjadinya perilaku *rent seeking* atau korupsi (Collombato, 2001). Dalam penyusunan anggaran usulan yang diberikan eksekutif memiliki muatan yang mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998).

Sutaryo & Tiara, (2015) kesenjangan informasi dapat mengakibatkan masalah kesulitan prinsipal untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap tindakan agen. Informasi yang diterima oleh *prinsipal* seringkali tidak lengkap sehingga tidak dapat memperlihatkan kinerja agen yang sebagaimana mestinya dalam mengelola kekayaan *prinsipal*.

### **Periode Jabatan**

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa kepala daerah yang memenangkan suara pemilu memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 tahun 2007 tentang pedoman pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah periode jabatan atau masa jabatan kepala daerah adalah tenggang waktu seorang kepala daerah memegang jabatan sebagai kepala daerah terhitung sejak pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berhenti menjadi kepala daerah. Sedangkan menurut Siagian (2009) menyatakan bahwa masa jabatan atau periode jabatan menunjukkan lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan.

### **Karakteristik Kepala Daerah**

Karakteristik didefinisikan sebagai kualitas atau sifat. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan 1) setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, dan 2) kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 1 (i) menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dibutuhkan kompetensi dari kepala daerah yang memadai untuk melaksanakan hal tersebut.

Kusuma dan Sutaryo (2015) melihat *personal background* dari periode jabatan kepala daerah. Periode jabatan dinilai dari petahana atau *incumbent* dan non petahana atau *non incumbent*. Sedangkan menurut Murni (2007) *personal background* meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan latar belakang pekerjaan.

### **Dukungan Politik**

Dukungan yaitu bentuk perhatian berupa bantuan moril maupun materi. Dukungan politik menggambarkan seberapa besar kepala daerah memiliki dukungan atau bantuan dari partai lain berupa koalisi. (Kusnandar dan Siswanto, 2015). Latar belakang politik dari kepala daerah yaitu adanya dukungan serta pengalaman politik. *Political background* meliputi pengalaman politik dan asal komisi (Winama dan Murni, 2017). Sedangkan Kusuma dan Sutaryo (2015) menyebutkan bahwa dukungan politik dilihat dari besaran kursi dari jumlah anggota dewan pendukung.

Berdasarkan pernyataan di atas maka pengertian dukungan politik adalah perhatian dan dukungan berupa moril dan tindakan dalam bentuk koalisi dan dilakukan oleh partai

politik yang mendukung calon dalam pemilu pilkada.

### **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Halim (2009: 135) pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan pendapatan asli daerah adalah perubahan pendapatan asli daerah dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (Kusuma dan Sutaryo, 2015).

Variabel pertumbuhan pendapatan asli daerah diproksikan dengan perhitungan laju pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah tahun sekarang dibagi dengan pendapatan daerah tahun sebelumnya diformulasikan sebagai berikut (Kusuma dan Sutaryo, 2015) :

$$\frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Menurut pernyataan di atas pertumbuhan pendapatan asli daerah adalah perubahan dari penerimaan melalui kas yang menambah ekuitas tahun sekarang dengan tahun sebelumnya yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

### **Pertumbuhan Belanja Daerah**

Menurut Halim (2009: 135) pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan belanja daerah adalah perubahan atau peningkatan belanja daerah tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (Kusuma dan Sutaryo, 2015). Menurut Bastian (2006) belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pelayanan umum.

Variabel pertumbuhan belanja diproksikan dengan perhitungan laju realisasi belanja tahun sekarang dikurangi dengan realisasi belanja tahun sebelumnya dan dibagi tahun sebelumnya. Perhitungan diformulasikan sebagai berikut (Kusuma dan Sutaryo, 2015):

$$\frac{\text{Belanja Daerah}_t - \text{Belanja Daerah}_{t-1}}{\text{Belanja Daerah}_{t-1}} \times 100\%$$

Maka dari itu dapat disimpulkan pertumbuhan belanja daerah adalah pertumbuhan belanja yang diproksikan menggunakan laju realisasi yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran.

### **Budget Forecast Error (Kesalahan Peramalan Anggaran)**

Peramalan (*Forecasting*) adalah ilmu dan seni untuk memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan dengan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan menggunakan beberapa bentuk model matematis (Render dan Heizer, 2009). Sementara itu definisi *Forecasting* menurut Santoso (2008: 8) adalah kegiatan yang bersifat teratur, berupaya memprediksi masa depan dengan menggunakan tidak hanya metode ilmiah namun mempertimbangkan hal yang bersifat kuantitatif. Brogan (2012) budget forecast errors diartikan sebagai tingkat kesalahan dalam memproyeksikan anggaran. Brogan (2012: 85) perkiraan anggaran pendapatan dan belanja tahunan cenderung berisikan oleh faktor-faktor politik sementara perkiraan jangka panjang bias dengan perhitungan politik. Menurut Blachard dan Leigh (2013) untuk perkiraan jangka panjang bisa dipengaruhi oleh faktor keuangan diantaranya adalah realisasi pendapatan dan belanja. Pendekatan naif, hanya memperkirakan kesalahan perkiraan anggaran berdasarkan data ekonomi dan pendapatan untuk tahun tertentu (Brogan, 2012).

$$\begin{aligned}
 & (\text{State Level Revenue [ Expenditure]. } K) \\
 & = \text{Constant} \\
 & + \beta_1 \text{ Un Employment}_{1. I} \\
 & + \beta_2 \text{ Lagged GSP } K - 1 \\
 & + \beta_3 \text{ Lagged Revenues } K \\
 & - 1K + \varepsilon
 \end{aligned}$$

Keterangan:

Revenue	=	Anggaran pendapatan k
Expenditure	=	Anggaran belanja t
Unemployment	=	Tingkat Pengangguran terbuka tahun pemilukada
GSP	=	PDRB perkapita tahun sebelum pemilukada
Lagged Revenues	=	Anggaran pendapatan t-1
$\beta$	=	Koefisien Regresi
$\varepsilon$	=	Standar Error

### Pengembangan Hipotesis

Menurut Carolina dan Sutaryo (2014) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam masa satu tahun anggaran yang dibahas disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD memiliki fungsi perencanaan yang berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan (Carolina dan Sutaryo, 2014). Maka dari itu APBD merupakan hal yang sangat penting dan harus disusun secara akurat. Namun tingkat ketepatan penyusunan APBD tidak terlepas dari terjadinya kemungkinan kesalahan. Kesalahan tersebut terbentuk dari beberapa faktor mulai dari faktor non keuangan hingga faktor keuangan.

Kepala daerah yang menginginkan masa jabatannya berkelanjutan lagi akan berupaya melakukan politisasi anggaran, dimana anggaran digunakan untuk membuat

citra yang baik sehingga mampu menarik pemilih. Dugaan potensi penyimpangan APBD akan meningkat ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama maju kembali sebagai calon *incumbent*, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tetap menjabat (Alam dan Ritonga, 2010).

Salah satu faktor yang terjadi adalah dukungan politik. Menurut Blanchard dan Leigh (2013) keadaan keuangan daerah yang tinggi cenderung akan menimbulkan kesalahan proyeksi berikutnya, contohnya pada saat masa pemilihan umum dimana daerah mengalami keadaan keuangan yang tinggi. Selain itu tingkat *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran bukan hanya dipengaruhi dari faktor keuangan tapi juga dari faktor non keuangan. Kesalahan proyeksi anggaran bisa terjadi karena faktor politik (Brogan, 2012).

Faktor keuangan dapat mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran diantaranya pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja. Menurut Kunsandar dan Siswantoro (2012) besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh daerah merupakan indikator bahwa daerah memiliki kemandirian dalam mengelola keuangannya. Semakin besar penerimaan PAD, daerah akan memiliki kebebasan untuk menggunakan pendapatan yang diterima di tahun anggaran berikutnya. Kemungkinan terjadinya kesalahan proyeksi anggaran disebabkan kebebasan daerah dalam mengalokasikan dan menggunakan anggarannya.

Faktor keuangan lainnya yang mempengaruhi *budget forecast error* adalah pertumbuhan belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dalam satu tahun anggaran. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) disusun untuk menentukan anggaran belanja pada tahap awal. Hal ini berarti anggaran belanja disusun sebelum menentukan pendapatan yang diterima. Rencana kerja yang besar dapat menyebabkan realisasi belanja semakin besar dan dapat menyebabkan kesalahan proyeksi anggaran. Blancard dan

Leigh (2013) mengatakan bahwa realisasi anggaran pasti lebih besar dari peramalan sebelumnya.

### Hipotesis Penelitian

$H_{0-1}$  :  $\beta < 0$ , Tidak terdapat pengaruh positif periode jabatan terhadap *budget forecast errors*.

$H_{a-1}$  :  $\beta \geq 0$ , Terdapat pengaruh positif periode jabatan terhadap *budget forecast errors*.

$H_{0-2}$  :  $\beta < 0$ , Tidak terdapat pengaruh positif dukungan politik terhadap *budget forecast errors*.

$H_{a-2}$  :  $\beta \geq 0$ , Terdapat pengaruh positif dan dukungan politik terhadap *budget forecast errors*.

$H_{0-3}$  :  $\beta < 0$ , Tidak terdapat pengaruh positif pertumbuhan PAD terhadap *budget forecast errors*.

$H_{a-3}$  :  $\beta \geq 0$ , Terdapat pengaruh positif pertumbuhan PAD terhadap *budget forecast errors*.

$H_{0-4}$  :  $\beta < 0$ , Tidak terdapat pengaruh positif pertumbuhan belanja daerah terhadap *budget forecast errors*.

$H_{a-4}$  :  $\beta \geq 0$ , Terdapat pengaruh positif pertumbuhan belanja daerah terhadap *budget forecast errors*.

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain ini digunakan untuk menguji hasil penelitian lain dan menggambarkan dan menganalisis keterkaitan antara variabel yang terdapat dalam rumusan masalah. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk mencari keterkaitan hubungan antar variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota sepulau Jawa yang melaksanakan pemilu pada tahun 2015 yang berjumlah 44 Kabupaten dan 10 Kota. Dari

kriteria sampling maka sampel penelitian sebanyak 50.

### Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda Persamaan regresi berganda menurut Sugiono (2014: 277) ditetapkan sebagai berikut:

$$\beta(\text{BFE}) = \beta_0 + \beta_2(\text{Periode}) + \beta_1(\text{ParPol}) + \beta_2(\text{GrowRev}) + \beta_3(\text{GrowExp} + \varepsilon$$

Keterangan:

BFE	=	Kesalahan proyeksi anggaran
PERIODE	=	Periode jabatan kepala daerah
PARPOL	=	Jumlah dukungan partai politik
GROWREV	=	Pertumbuhan pendapatan
GROWEXP	=	Pertumbuhan belanja
$\beta$	=	Koefisien Regresi
$\varepsilon$	=	Standard Errors

### Deskriptif Statistik dan Hasil Penelitian

Nilai minimum bernilai 0 dan maksimum bernilai 1. Pemerintah daerah yang mempunyai kepala daerah *non incumbent* sebanyak 31 daerah sedangkan daerah yang memiliki calon *incumbent* sebanyak 20 daerah kabupaten dan kota atau sebanyak 38 % daerah kabupaten kota memiliki kepala daerah *non incumbent* dan 62% adalah *incumbent*. Kepala daerah yang mencalonkan kembali lebih banyak dibanding calon *non incumbent*. Rata-rata dukungan politik pada pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2015 0,588 atau 60% dan nilai maksimum dengan dukungan partai politik terbanyak diperoleh Kabupaten Ngawi sebanyak 0,78 atau 78% dukungan dari partai politik yang menduduki kursi DPRD pada tahun 2015, sedangkan nilai terendah didapat oleh Kabupaten Trenggalek dan Blora yang mendapat perolehan sebanyak 0,18 atau 18%.

Rata-rata untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah diperoleh sebanyak 0,13 atau 13%. Nilai minimum sebanyak 0.01 atau 0.1% yang diperoleh oleh Kabupaten Kebumen, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,25 atau 25% diperoleh oleh Kabupaten Pacitan. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan PAD pada tahun 2015 dan salah satu pos pendapatan asli daerah bertambah. Pada Realisasi Kabupaten Pacitan tahun 2014 sebanyak Rp. 101,276,945,021.59 dan 2015 sebanyak Rp. 126,449,078,416.80, hal ini disebabkan oleh selisih yang cukup jauh sebanyak Rp. 25,172,133,395.21 yang berarti 25% pertumbuhan dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan belanja daerah memiliki rata-rata sebanyak 0.10% atau 0.11%. Nilai minimum 0.0004 diperoleh oleh Kabupaten Semarang, sedangkan nilai tertinggi 0,26 diperoleh oleh Kabupaten Lamongan. Belanja daerah yang tinggi dapat disebabkan oleh kebutuhan belanja setiap daerah yang berbeda.

Rata-rata pemerintah daerah memiliki tingkat kesalahan proyeksi anggaran sebesar 22,83 % dengan perolehan tingkat *budget forecast errors* tertinggi sebesar 75,03% adalah Kabupaten Serang. Sedangkan yang mendapat *budget forecast errors* terendah sebesar 2,14 adalah Kabupaten Blora. Kesalahan dalam penganggaran disebabkan oleh perkiraan pendapatan dan belanja yang jauh dari angka realisasi dan ketidaktepatan dalam memperhitungkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan Pengangguran terbuka.

**Uji Normalitas**

**Tabel 1.1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

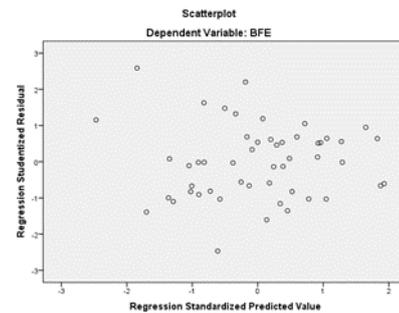
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau

tidak. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan kolmogorov-smirnov (K-S) dengan menggunakan SPSS versi 23 dimana dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi dimana apabila  $asympt.sig > 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal namun apabila  $asympt.sig < 0.05$  maka data tidak berdistribusi normal. Dalam data di atas  $asympt.sig$  berjumlah 0.200 dimana  $>$  dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**Uji Heteroskedasitas**

**Gambar 1.1 Uji Heteroskedasitas**



Uji heteroskedasitas dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear dan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Dalam uji ini menggunakan grafik *scatterplot* dimana bahwa titik-titik menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas dalam penelitian ini dan model regresi layak dipergunakan.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 1.2 Runs Test**

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.478

**Median**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu dengan periode t dengan t-1. Dalam penelitian ini digunakan *Run test* untuk mengukur autokorelasi dengan standar pengukuran: jika  $\text{sig} < 0,05$  yang berarti hipotesis nol ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi autokorelasi antara nilai residual (Ghozali,2011: 120).

- Ho : residual (res\_1) random (acak)
- Ha: residual (res\_1) tidak (random)

Dalam penelitian ini Asymp sig 0,478 > 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi karena Ho diterima yaitu residual random acak.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 1.3 Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PERIODE	.878	1.138
DUKUNGAN	.948	1.054
GROWREV	.953	1.049
GROWEXP	.911	1.098

Pengujian ini dilakukan untuk melihat hubungan linear antara variabel bebas, dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Ghozali (2007: 42), nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/\text{tolerance}$ ) nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas nilai toleransi > 0,10 atau sama dengan < 10. Dari pengujian diatas seluruh variabel tidak ada yang mengalami multikolinearitas karena nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

### Uji Hipotesis

**Tabel 1.4 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup> Adjusted)**

Model Summary <sup>b</sup>			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.521 <sup>a</sup>	.272	.208

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. *R square* menunjukkan 0,272 dimana 27% variasi *budget forecast errors* dapat dijelaskan oleh ke empat variabel. Sedangkan sisanya 73% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam model, nilai R bernilai 0,521 dimana terjadi hubungan cukup antara variabel independen terhadap dependen dan nilai *R square adjusted* bernilai 0,208 atau 21% dimana 79% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.

### Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 1.5 Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Df	F	Sig.
1	Regression	4	<b>4.288</b>	<b>.005<sup>b</sup></b>
	Residual	46		
	Total	50		

Uji F dilakukan untuk menilai apakah model regresi yang digunakan layak selain untuk mengetahui uji simultan dimana semua variabel berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil *probability value* dari model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikan penelitian < 5% yaitu sebesar 0,001 dan nilai Fhitung 4,288 > Ftabel 2,61 Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis.

**Uji Parsial (Uji t)**

**Tabel 1.6 Uji Parsial (Uji t)**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.931	.060
	PERIODE	-2.387	.021
	DUKUNGAN	2.195	.033
	GROWREV	-2.329	.024
	GROWEXP	2.174	.035

**Dependent Variable: BFE**

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel dependen terhadap independen . Rumusan hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

Ho : variabel independen tidak berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.

Ha : variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut:

Ho ditolak jika  $p\text{-value} > \alpha$  (0,05,50)

Ha ditolak jika  $p\text{-value} < \alpha$  (0,05,50)

Berdasarkan nilai dalam tabel di atas bahwa:

**Periode Jabatan**

t-tabel(0.05,50) 1.677 thitung -2.387

t-tabel < t-hitung 1.677 < -2.387

Sig 0.021 < 0.05

maka Ho diterima bahwa periode jabatan berpengaruh negatif terhadap *budget forecast errors*.

**Dukungan Politik**

t-tabel (0.05,50) 1.677F thitung 2.195

t-tabel(0.05,50) > t-hitung t 2.195 < 1.677

sig 0.033 < 0.05

maka Ho ditolak bahwa dukungan politik berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors*.

**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

t-tabel(0.05,50) 1.677 thitung-2.329

t-tabel(0.05,50) < t hitung

sig 0.024 < 0.05

maka Ho ditolak bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap *budget forecast errors*.

**Pertumbuhan Belanja Daerah**

t-tabel (0.05,50) 1.677 hitung2.174

t-tabel(0.05,50) < t hitung

sig 0.035 < 0.05

maka Ho ditolak bahwa pertumbuhan pendapatan belanja daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors*.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah melakukan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat dijelaskan pengaruh variabel independen terhadap dependen sebagai berikut:

**Pengaruh periode jabatan, dukungan politik, pertumbuhan PAD dan pertumbuhan belanja daerah terhadap budget forecast errors**

Ho diterima jika tingkat signifikansi >0,05 : Tidak terdapat pengaruh simultan

Ha diterima jika tingkat signifikansi < 0,05: Terdapat pengaruh simultan

Dari hipotesis simultan, dapat dilihat adanya pengaruh simultan dengan variabel dependen sesuai dengan uji statistika F yang bertujuan untuk melihat pengaruh bersama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji F tersebut ditemukan bahwa H1 diterima yaitu periode jabatan, dukungan politik, pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja daerah terhadap *budget forecast errors*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusuma dan Sutaryo (2015) bahwa periode jabatan, dukungan politik, pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja daerah berpengaruh secara simultan terhadap *budget forecast error*.

**Pengaruh Periode Jabatan Terhadap Budget Forecast Errors**

Periode jabatan menggunakan pengukuran *personal background* kepala daerah dilihat melalui *incumbent* dan *non incumbent*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hipotesis :

$H_{0-1}$  :  $\beta < 0$ , Tidak terdapat pengaruh positif periode jabatan terhadap budget forecast errors.

$H_{a-1}$  :  $\beta \geq 0$ , Terdapat pengaruh positif periode jabatan terhadap budget forecast errors.

Hipotesis 1 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa periode jabatan berpengaruh negatif terhadap *budget forecast errors*. Hasil ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Alam dan Ritonga (2010) dugaan potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) akan meningkatkan ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon *incumbent* berada pada masa titik krusial, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tetap menjabat. Sebagai calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), *incumbent* cenderung untuk melakukan politisasi anggaran. Mendukung teori keagenan bahwa konflik antara *principal* dan agen disebabkan adanya kepentingan dari dua belah pihak. *Principal* berkeinginan agar agen bekerja sesuai dengan keinginan, sedangkan agen bekerja untuk kepentingan pribadinya. Kepala daerah *incumbent* berusaha memberikan kinerja yang baik dimata masyarakat dengan melakukan berbagai macam pembangunan dalam waktu singkat. Hal ini bisa disebabkan baik calon *incumbent* maupun *non incumbent* dapat mempengaruhi kesalahan penganggaran dikarenakan motivasi jabatan yang sama sesuai dengan teori agensi yaitu jika informasi yang diperoleh *principal* dari agen tidak lengkap dan tidak menunjukkan kinerja agent yang sebenarnya dalam mengelola kekayaan *principal*, maka dapat dimanfaatkan agen untuk kepentingan

pribadi ataupun kelompok (Hartanto dan Probohudono, 2013). Ini dibuktikan dengan tingkat *budget forecast errors non incumbent* pun mengalami *budget forecast errors* yang cukup tinggi.

Penyebab *non incumbent* dapat mempengaruhi *budget forecast errors* dikaitkan dengan *political background* atau kepentingan partai dalam pemilihan berikutnya. Selain itu *incumbent* tidak semua mempengaruhi *budget forecast errors* karena dari data deskriptif yang ada sebagian dari daerah yang kepala *incumbent* dalam hal ini justru *non incumbent* mempengaruhi tingkat proyeksi anggaran. Hasil penelitian ini berbeda dengan Kusuma dan Sutaryo (2015) dan Maesa (2017) dimana periode jabatan tidak mempengaruhi *budget forecast errors*. Selain itu faktor hubungan kandidat *incumbent* maupun *non incumbent* terhadap DPRD mempengaruhi kesalahan dalam peramalan anggaran, Walaupun *non incumbent* namun dia memiliki kedekatan dengan DPRD maka akan tetap berpengaruh terhadap kesalahan peramalan anggaran dan sebaliknya apabila *incumbent* mempunyai hubungan yang buruk dengan legislatif maka hanya mempengaruhi sedikit kebijakan tentang anggaran dimana kesalahan *budget forecast errors* pun menurun. Perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya Kusuma dan Sutaryo (2015) memiliki cakupan yang lebih luas yaitu se-Indonesia dan menggunakan dua variabel *intervening* tipe pemerintahan dan jumlah SKPD, sedangkan yang membuat berbeda dengan penelitian Maesa (2017) adalah perbedaan cakupan wilayah penelitian Maesa (2017) dilakukan di pulau Sumatera dengan dengan tidak menggunakan pengukuran pertumbuhan PAD dalam pengukuran variabelnya.

### **Pengaruh Dukungan Politik Terhadap Budget Forecast Errors**

H<sub>0-2</sub> :  $\beta < 0$ , Tidak terdapat pengaruh positif dukungan politik terhadap *budget forecast errors*.

H<sub>a-2</sub> :  $\beta \geq 0$ , Terdapat pengaruh positif dukungan politik terhadap *budget forecast errors*.

Hipotesis 2 diterima. Artinya dukungan politik kepala daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Proses politik merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan arah kebijakan pemerintahan Adzani dan Martani (2014). Proses politik dapat mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintahan melalui berbagai macam cara baik melalui kepentingan politik, hubungan antar masyarakat dan hubungan eksekutif legislatif (Gourevicth, 2003). Dalam hal ini faktor politik dapat mempengaruhi kesalahan dalam peramalan anggaran terutama pada saat pemilihan umum dimana adanya kepentingan politik partai yang mempengaruhi penyusunan anggaran, rata-rata dari dukungan politik sebesar 60% dukungan kursi di DPRD hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dukungan politik terhadap *budget forecast errors*. Usulan apapun yang diberikan kepala daerah akan selalu disetujui karena terdapat mekanisme politik yang lebih mementingkan kepentingan partai politik sehingga menyebabkan dukungan politik berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors*.

Mendukung teori keagenan bahwa konflik keagenan disebabkan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh agen tanpa sepengetahuan *principal*. Apabila kepala daerah memiliki dukungan yang banyak maka semakin cepat dalam penetapan APBD. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Sutaryo (2015) bahwa dukungan politik berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* namun berlawanan dengan penelitian Maesa (2017) bahwa dukungan politik tidak berpengaruh pada *budget forecast error*.

### **Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Budget Forecast Errors**

H<sub>0-3</sub> :  $\beta < 0$ , Tidak terdapat pengaruh positif pertumbuhan PAD terhadap *budget forecast errors*.

H<sub>a-3</sub> :  $\beta \geq 0$ , Terdapat pengaruh positif pertumbuhan PAD terhadap *budget forecast errors*.

Hipotesis 3 ditolak maka pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap *budget forecast errors*. Artinya pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *budget forecast* namun secara negatif. Hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan penjelasan dalam pengembangan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan yang diprosikan dari total PAD, maka akan semakin tinggi tingkat *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Sehingga semakin besar penerimaan PAD maka daerah tersebut semakin mandiri dan bebas mengalokasikan pendapatan yang diterima untuk anggaran tahun berikutnya. Daerah yang semakin bebas mengalokasikan PAD yang diterima maka akan semakin besar kemungkinan untuk terjadi *budget forecast errors* (Kusuma dan Sutaryo, 2015). Semakin tinggi PAD maka daerah memiliki sumber dana yang tinggi untuk dapat membangun daerahnya. PAD yang besar memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dan yang besar untuk belanja modal maupun belanja pegawai karena kepala daerah ingin menunjukkan kinerja yang baik di mata masyarakat. Dengan membelanjakan modal yang tinggi untuk pembangunan dari hasil PAD yang tinggi memungkinkan adanya kesalahan dalam pembangunan baik dari perencanaan hingga pelaksanaan. Mendukung teori keagenan bahwa konflik terjadi karena adanya asimetris informasi antara *principal* (rakyat) dengan agen (pemerintah daerah) dimana agen memiliki akses mengenai anggaran pendapatan sehingga berupaya memperlihatkan kinerja dengan

memaksimalkan manfaat dari pendapatan daerah. Namun pada kenyataannya PAD belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap belanja modal (Priatnasari, 2015). Hal ini berhubungan dengan kesenjangan fiskal dimana pemerintah pusat masih memberikan dana perimbangan yang cukup besar sehingga PAD berpengaruh secara negatif terhadap *budget forecast errors* di mana terdapat dalam Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemetintah Pusat dan Daerah. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Pradita (2011) bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal yang artinya bahwa daerah kabupaten dan kota mempunyai sedikit kewenangan dalam mengelola PAD-nya dan berdampak pada *budget forecast errors*. Perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya Kusuma dan Sutaryo (2015) memiliki cakupan yang lebih luas yaitu se-Indonesia dan menggunakan dua variabel *intervening* tipe pemerintahan dan jumlah SKPD, sedangkan yang membuat berbeda dengan penelitian Maesa (2017) adalah perbedaan cakupan wilayah penelitian Maesa (2017) dilakukan di pulau Sumatera dengan dengan tidak menggunakan pengukuran pertumbuhan PAD dalam pengukuran variabelnya.

#### **Pengaruh Pertumbuhan Belanja Daerah Terhadap Budget Forecast Errors**

$H_{0-4} : \beta < 0$ , Tidak terdapat pengaruh positif pertumbuhan belanja daerah terhadap *budget forecast errors*.

$H_{a-4} : \beta \geq 0$ , Terdapat pengaruh positif pertumbuhan belanja daerah terhadap *budget forecast errors*.

Hipotesis 4 diterima. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penjelasan dalam pengembangan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan belanja maka akan semakin tinggi tingkat *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Menurut Permendagri nomor 37 tahun

2014 tahapan awal penyusunan APBD yaitu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Mendukung teori keagenan bahwa konflik akan ditimbulkan karena adanya konflik kepentingan antara *principal* dan agen. Agen yaitu pemerintah daerah akan berusaha menunjukkan kinerjanya dalam pandangan masyarakat. Untuk menunjukkan kinerja yang baik maka disusun rencana kerja yang besar sehingga membutuhkan dana yang besar yang dapat menyebabkan kesalahan dalam proyeksi anggaran. RKPD yang disusun memuat rencana kerja dan pendanaan yang akan digunakan, sehingga anggaran belanja akan disusun sebelum menentukan pendapatan yang akan diterima. Realisasi belanja daerah sebelum tahun anggaran akan mendasari penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka semakin besar belanja daerah akan semakin meningkat pula *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Semakin tinggi sebuah daerah mengalami pertumbuhan belanja maka semakin tinggi pula pengaruhnya pada *budget forecast errors* sejalan dengan pernyataan kepala daerah dapat meningkatkan probabilitas pemilihan kembali dengan menyatakan pengeluaran atau belanja yang lebih tinggi di tahun pemilihan hal ini digunakan untuk menghindari pemotongan pada tahun-tahun pemilihan tersebut agar lebih besar selanjutnya mereka membuat proyeksi yang bias memungkinkan pemerintah yang memungkinkan mereka membuat peningkatan dalam pengeluaran (Veiga & Boukari, 2016).

Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Sutaryo (2015) bahwa belanja berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran jika dikaitkan dengan PDRB yang menjadi salah satu komponen perhitungan *budget forecast errors*. Peningkatan dalam belanja daerah juga dilakukan untuk menunjukkan kinerja yang baik dengan membuat proyek yang besar yang menyebabkan kesalahan dalam penganggaran untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam

pemerintah daerah sehingga dapat terpilih kembali pada periode selanjutnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusuma dan

Sutaryo (2015) dan Maesa (2017) bahwa pertumbuhan belanja daerah berpengaruh terhadap *budget forecast error*.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yang diambil dari analisis data sebelumnya sebagai berikut:

Periode jabatan, dukungan politik, pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja daerah berpengaruh secara serentak terhadap *budget forecast errors*.

Periode jabatan berpengaruh negatif pada kesalahan dalam peramalan anggaran atau *budget forecast errors* disebabkan latar belakang politik pada calon kepala daerah.

Dukungan politik berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors*. Semakin banyak dukungan politik yang ada di kursi DPRD maka semakin besar pula kesalahan dalam peramalan anggaran atau *budget forecast errors*.

Pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap *budget forecast errors*. Semakin kecil PAD justru semakin besar kesalahan dalam peramalan anggaran atau *budget forecast errors* karena sebagian besar daerah di Pulau Jawa memiliki ketergantungan fiskal yang masih tinggi sehingga tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan PAD dalam belanjanya.

Pertumbuhan belanja daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors*. Semakin besar pemerintah daerah mengalami pertumbuhan belanja maka semakin besar pula kesalahan dalam peramalan anggaran atau *budget forecast errors*,

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan, maka saran dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa tingkat *budget forecast errors* di

kabupaten dan kota di pulau Jawa masih tergolong tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor keuangan maupun non keuangan. Pemerintah diharapkan untuk dapat lebih teliti dalam peramalan anggaran dengan melakukan pengawasan dan pelaksanaan yang baik serta mengawasi agar tidak terjadinya *mark down* maupun *mark up* yang dilakukan oleh calon *incumbent* maupun oleh anggota DPRD yang menduduki partai pendukung calon *incumbent* maupun *non incumbent*.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa *non incumbent* dapat mempengaruhi *budget forecast errors* hal ini disebabkan oleh dukungan politik dan kepentingan kelompok dalam DPRD. Dalam hal ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pengawasan ketika dimulainya perencanaan anggaran agar bebas dari kepentingan manapun.

Dari hasil temuan peneliti bahwa dukungan politik dalam pemerintahan daerah sangat tinggi dan cenderung daerah yang memiliki dukungan politik yang tinggi mempunyai kesalahan yang tinggi. Pemerintah kabupaten kota diharapkan dapat meningkatkan *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) dalam penyusunan dapat mengatasi kesalahan dalam APBD agar penganggaran.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa semakin kecil PAD maka semakin besar *budget forecast errors* sehingga pemerintah diharapkan untuk memanfaatkan PAD sesuai pada porsinya dan tidak digunakan untuk kepentingan politik apalagi menjelang Pilkada.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa semakin besar pertumbuhan belanja maka semakin besar *budget forecast errors*. Pemerintah diharapkan untuk meramalkan dan membelanjakan sesuai dengan kepentingan

daerah dan mengurangi belanja hibah yang meningkat apabila menjelang pemilu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adzani, Akhmad H dan Martani, Dwi.2014. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan Ketidak Petuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Daerah. Proceeding Simposium Nasional A
- Blanchard O dan Leigh D .2013. Growth Forecast and Fiscal Mulripers. International Monetary Fund. IMF Working Pap
- Brogan, Michael.2012.The Political of Budgeting: Evaluating the effect of political election cycle on state budget forecast errors. Publik Administration Quartely SPRING. Rider University:85-93
- Carolina, Okki dan Sutaryo.2014. Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Indonesia. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok.
- Colombatto, Enrico. 2001. Discretionary Power, Rent-Seeking and Corruption. University di Torino & ICER, working paper.
- Gourevitch., P., A., (2003) The politics of corporate governance regulation. New York: Oxford University Press, pp. 250.
- Halim A dan S Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah:Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi.Jurnal Akuntansi Permerintah, 2(1):53-64
- Halim, A. (2009). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi tiga). Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. DPR dan Presiden. Jakarta.
- Indonesia. 2004. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemetintah Pusat dan Daerah. DPR dan Presiden. Jakarta.
- Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 1 (i) tentang Pemerintahan Daerah. DPR dan Presiden. Jakarta.
- Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPR dan Presiden. Jakarta.
- Indonesia. 2007. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah. DPR dan Presiden. Jakarta.
- Indonesia. 2014. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. DPR dan Presiden. Jakarta.
- Indonesia. 2014. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. DPR dan Presiden. Jakarta.
- Jensen,M.C dan Meckling, WH.1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics,3(4),305-360
- Kuntansi XVII Lombok.Agus Tri Basuki, Nano Prawoto.2016. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis.Jakarta:Rajawali press.
- Kusnandar dan Siswanto D. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- Kusuma, Tiara Rahma dan Sutaryo.2015. Pengaruh Faktor Keuangan dan Nonkeuangan terhadap kesalahan

- proyeksi anggaran Pemerintah di daerah Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September 2015.
- Maesa P. 2017. Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan Dan Belanja Daerah Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah Di Sumatera. Universitas Negeri Padang.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta, Andi,
- Medcom.id. 18 Agustus 2015. Kesalahan Penganggaran Pemda Penyebab Rendahnya Penyerapan Daerah. <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/8koGDr3k-kesalahan-penganggaran-pemda-penyebab-rendahnya-penyerapan-daerah>
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujoko Efferin, Darmadji, S.H, dan Tan. 2008. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Veiga, Fransisco Joe and Mamadou Boukari. 2015. The Effect of Politics on Budget Forecast Errors : Comparative Evidence.